



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA  
BADAN KERJASAMA ANTAR PARLEMEN DPR RI KE BOGOR  
DALAM RANGKA MENINGKATKAN DIPLOMASI PARLEMEN DAN Mencari  
MASUKAN TERKAIT PROYEKSI POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA PADA  
TAHUN 2022 SERTA UPDATE PERKEMBANGAN  
ISU-ISU INTERNASIONAL  
27 JANUARI 2022**

## **I. PENDAHULUAN**

DPR RI sebagai lembaga yang juga mempunyai mandat untuk membantu memperkuat diplomasi pemerintah melalui *multi-track diplomacy* mempunyai peran vital dalam mensukseskan berbagai kebijakan luar negeri RI. Melalui Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP), DPR RI merupakan ujung tombak diplomasi parlemen yang bertujuan untuk membina, mengembangkan, dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPR dan parlemen negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral, termasuk berbagai organisasi internasional untuk mencapai kepentingan nasional. Dengan demikian, sinergitas antara pemerintah dengan legislatif dalam menyikapi berbagai isu global sangat dibutuhkan.

Pada tahun 2022, DPR RI juga akan menjadi tuan rumah pelaksanaan Sidang Majelis Umum *Inter-Parliamentary Union (IPU)* ke-144 yang menjadi forum pertemuan para ketua parlemen se-dunia. Pelaksanaan Sidang Umum IPU di Indonesia juga merupakan momen penting bagi DPR untuk turut serta menentukan berbagai agenda global sesuai kepentingan nasional. Seperti tahun-tahun sebelumnya, BKSAP DPR RI juga akan mengikuti berbagai forum antar parlemen seperti *AIPA Assembly Meetings* di tingkat ASEAN, *Asia Pasific Parliamentary Forum (APPF)* di tingkat Asia Pasifik, *Asia-Europe Parliamentary Meetings (ASEP)*, dan berbagai forum global lainnya seperti berkaitan dengan SDGs, gender, youth parliamentarians, perubahan iklim, serta sejumlah pertemuan bilateral dengan negara-negara sahabat.

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan sinergitas antara DPR RI dan Pemerintah dalam menyikapi berbagai isu global, BKSAP memandang perlu adanya peningkatan pemahaman terkait prioritas kebijakan luar negeri RI tahun 2022 terutama dari Kementerian Luar Negeri. Oleh karena itu, BKSAP menginisiasi adanya suatu forum diskusi yang menghadirkan Wakil Menteri Luar Negeri RI beserta jajarannya. Forum ini sangat penting terutama bagi BKSAP DPR RI sebagai bagian dari upaya memperkuat peran DPR dalam menjalankan diplomasi parlemen.

#### **A. Dasar Kegiatan**

Pelaksanaan kegiatan Kunjungan kerja BKSAP DPR RI ke Bogor pada tanggal 27 Januari 2022 didasarkan pada Surat Tugas Nomor 08/D/ST-PD.DN/BKSAP-KSB/1/2022 tanggal 17 Januari 2021.

#### **B. Tujuan Acara**

- Meningkatkan pemahaman DPR RI terutama Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) terkait proyeksi politik luar negeri RI tahun 2022;
- Mendapatkan update perkembangan Isu-isu Internasional;
- Meningkatkan sinergitas antara DPR RI dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Civitas Akademika dalam memperjuangkan kepentingan nasional pada tingkat regional maupun global serta mengidentifikasi tantangan dan peluang diplomasi;
- Memperkuat peran DPR RI dalam memperjuangkan kepentingan nasional dan prioritas kebijakan luar negeri melalui berbagai forum antar parlemen baik pada tingkat regional maupun internasional.

#### **C. Pelaksanaan Kegiatan**

##### **1. Narasumber**

- Wakil Menteri Luar Negeri RI beserta jajarannya;
- Dirjen Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri RI
- Dirjen Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI
- Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI
- Dirjen Informasi dan Diplomasi Kementerian Luar Negeri RI
- Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Kementerian Luar Negeri RI
- Staf Khusus untuk Penguatan Program-Program Prioritas Kemenlu RI
- Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI

##### **2. Waktu Pelaksanaan**

- Hari/ Tanggal : Kamis, 27 Januari 2022
- Waktu : Pukul 13.30 – selesai
- Tempat : Hotel Rancamaya  
Jl. Rancamaya Utama, Bogor Selatan

### 3. Peserta

#### a. Anggota DPRRI

No	Nama	Jabatan
1.	DR. H. Fadli Zon, S.S., M.Sc	Ketua BKSAP/F-P.Gerindra)
2.	Sihar P.H. Sitorus ( <b>Virtual</b> )	Wakil Ketua BKSAP/ (F-PDIP)
3.	Putu Supadma Rudana	Wakil Ketua BKSAP/(F-PD)
4.	Dr. H. Mardani Ali Sera, M.Eng.	Wakil Ketua BKSAP/(F-PKS)
5.	Ir. H. A. Hafisz Tohir	Wakil Ketua BKSAP/PAN
6.	Gilang Dhielafararez, SH, LL.M.	Anggota BKSAP (F-PDIP)
7.	Hj. Ade Rosi Khoerunnisa, S.Sos., M.Si	Anggota BKSAP (F-PG)
8.	Hj. Himmatul Aliyah, S.Sos., M.Si.	Anggota BKSAP (F-P.Gerindra)
9.	Hasbi Anshory, S.E., M.M.	Anggota BKSAP(F-P.Nasdem)
10.	Drs. H. Andi Muawiyah Ramly, M.Si	Anggota BKSAP ( F-PKB)
11.	Dr. H. Syahrul Aidi Ma'azat, L.C., M.A	Anggota BKSAP ( F-PKS)
12.	Dr. Asman Abnur, S.E., M.Si.	Anggota BKSAP ( F-PAN)
13.	Rojih	Anggota BKSAP ( F-PPP)

#### b. Pemerintah Daerah

- Drs. H. Dedie A. Rachim - Wakil Walikota Bogor beserta jajarannya.

#### c. Civitas Akademika

- Perwakilan Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jakarta.

## II. ISI LAPORAN

### A. PERSIAPAN PELAKSANAAN TUGAS

Materi yang dijadikan referensi bagi Ketua BKSAP DPR RI diolah oleh Tenaga Ahli dan Sekretariat KSB BKSAP berupa paparan.

### B. AGENDA

WAKTU	PROGRAM	KET
13.00	Acara Dimulai	MC
13.00 – 13.05	Menyanyikan lagu Indonesia Raya	
13.05 – 13.10	Pembukaan acara dan Sambutan oleh Ketua BKSAP	<b>Dr. Fadli Zon</b>

13.10 – 14.20	Pemaparan oleh Wakil Menteri Luar Negeri RI	Narasumber: <b>Mahendra Siregar</b>
	Sesi Diskusi dan Tanya Jawab	
	Penutupan & Sesi Foto Bersama	

## C. PELAKSANAAN ACARA

### 1. Pembukaan

Acara ini dibuka oleh Ketua BKSAP, dihadiri Wakil Menteri Luar Negeri RI beserta jajarannya dan Wakil Walikota Bogor, Drs. H. Dedie A. Rachim serta beberapa perwakilan mahasiswa/i dari civitas akademika. Dalam sambutannya, Ketua BKSAP menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Luar Negeri RI yang selama ini menjadi mitra strategis BKSAP dalam berbagai upaya diplomasi total untuk mencapai kepentingan nasional, utamanya melalui peran diplomasi parlemen yang dilakukan oleh DPR RI. Selain itu, BKSAP DPR RI juga mengapresiasi berbagai upaya dan peran aktif yang telah dilakukan Kementerian Luar Negeri di tengah situasi krisis akibat pandemi ini, khususnya dalam rangka memastikan Indonesia menjadi bagian dari kepemimpinan kolektif global untuk mewujudkan dunia yang lebih baik. BKSAP sepenuhnya mendukung berbagai upaya ini dan senantiasa siap untuk bersinergi dengan Kementerian Luar Negeri guna mewujudkan kepentingan nasional Indonesia.



Bahwa tantangan yang kita hadapi bukan hanya berasal dari pandemi COVID-19, namun juga berbagai masalah yang tidak kunjung usai seperti perjuangan kemerdekaan rakyat Palestina yang tentu saja terus menjadi prioritas diplomasi Indonesia, krisis kemanusiaan di Afghanistan dan

Rohingya, serta krisis politik di Myanmar. Selain itu, kita juga dihadapkan dengan tantangan berasal dari rivalitas antara negara besar di Kawasan ASEAN dan Indo-Pasifik, perubahan iklim, perundingan batas maritim, dan lain sebagainya



Ketua BKSAP DPR RI juga memaparkan beberapa keikutsertaan BKSAP di event-event internasional pada tahun 2021. Beberapa kegiatan yang diikuti antara lain PUIC di Istanbul, *Women Parliamentarian* di Vienna, *Pre-COP* di Roma, IPU di Madrid, COP26 di Glasgow, UNODC Mesir, APPF secara virtual, sidang eksekutif fisik APA dan lain-lain. BKSAP juga mengusulkan emergency item tentang Myanmar di AIPA pada 2021. Meskipun tidak mendapatkan dukungan, emergency item ini tentu menjadi suatu langkah produktif dari DPR. Ketua BKSAP DPR RI ini juga menyampaikan bahwa pada banyak forum, BKSAP DPR RI seringkali mengajukan banyak resolusi dan dalam setiap pertemuan internasional tersebut BKSAP DPR RI selalu kerjasama dengan Kementerian Luar Negeri RI.

Pada tahun 2022 ini, BKSAP akan menjadi host bagi dua agenda besar yaitu; 1) *IPU General Assembly and Related Meetings* ke-144 pada 20-24 Maret di Nusa Dua, Bali; dan 2) *P20 Speakers' Summit* pada September 2022 di Jakarta atau Bali. Tahun lalu, Indonesia harusnya juga tuan rumah jadi *The Meeting of Speakers of Eurasian Countries' Parliaments* (MSEAP). Biasanya hadir 80-an negara namun saat ini belum bisa terlaksana. Selain itu, kita juga mengadakan forum Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership terakhir pada tahun 2018, saat sekarang ini belum bisa terlaksana padahal ini penting. Melalui forum ini, BKSAP berharap mendapatkan info terbaru mengenai beberapa krusial seperti isu Palestina, Afghanistan, Rohingya, dan krisis politik Myanmar. Selama ini, BKSAP cukup aktif melakukan

engagement dengan dengan berbagai pihak mengenai isu-isu yang mengemuka. Minggu lalu, Ketua BKSAP baru menjadi salah satu narasumber pada acara Webinar yang diadakan oleh *European Parliament* mengenai peringatan 1 tahun kudeta di Myanmar.

Pada bulan Mei 2021 tahun lalu, BKSAP juga cukup intensif berkomunikasi dengan parlemen Afghanistan, BKSAP mengadakan acara dan dengan GKSB dan *Women Parliamentarian of Afghanistan*. Ini tentu merupakan suatu kegiatan penting bagi BKSAP karena satu-satunya parlemen di Asia Tenggara yang memberi respon cepat terhadap kejadian di Afghanistan. Berkaitan dengan agenda Sidang IPU ke-144 mendatan, BKSAP DPR RI melakukan serangkaian komunikasi dengan IPU terkait tema debat umum atau *General Assembly*. Pada akhirnya tema yang disepakati adalah "*Getting to Zero: Mobilizing Parliament to Act on Climate Change*". Kenapa memilih tema ini karena ini isu perubahan iklim belum diangkat di IPU dan erat kaitannya dengan COP26 Glasgow *Climate Pact* yang baru tahun lalu dilaksanakan.

Selain itu, BKSAP DPR RI juga baru meluncurkan Buku Putih Ekonomi Hijau Indonesia atau *Green Economy Agenda for Indonesia*. Melalui inisiatif itu, BKSAP menginginkan bahwa isu climate change ini mendapatkan perhatian lebih besar dari para anggota parlemen dunia dalam konteks Indonesia tentu bisa disosialisasikan ke daerah masing-masing oleh Anggota DPR. Sedangkan terkait Presidensi DPR RI di P20 Summit, BKSAP juga telah membantu merumuskan tema sehingga disepakati yaitu: "Peran Parlemen dalam Mendorong Pertumbuhan yang lebih tinggi dan masyarakat yang lebih sehat." Tema ini sudah disampaikan oleh Ketua DPR RI di forum IPU ke-143 lalu di Madrid.



Terakhir, di BKSAP juga membuat dua Panitia Kerja (Panja) yaitu 1) Panja Indo-Pasifik dan 2) Panja SDGs. Ini menunjukkan perhatian yang besar kita terhadap dua isu yang tentu sangat penting yaitu mengenai Indo-Pasifik dan juga percepatan SDGs. Program lain yang dilakukan BKSAP secara terus-menerus meskipun dalam kondisi pandemi adalah kegiatan BKSAP SDGs Day. Yaitu suatu kegiatan kunjungan ke daerah yang dilakukan untuk mensosialisasikan dan mendorong supaya berbagai pihak di daerah lebih aware terhadap percepatan SDGs. Isu SDGs belum mendapat perhatian yang besar dari pihak-pihak di daerah sehingga BKSAP DPR RI terus menerus melakukan kegiatan tersebut.

## 2. Pemaparan

- **Wakil Menteri Luar Negeri RI – Mahendra Siregar**

Wakil Menteri Luar Negeri RI mengucapkan terima kasih kepada BKSAP DPR RI yang secara aktif telah melakukan upaya-upaya diplomatik. Menurutnya, kerjasama dengan BKSAP sangat terasa sehingga kerjasama ini perlu dilanjutkan dan ditingkatkan. Dua pokok pembicaraan pada forum tersebut, yaitu pertama, terkait apa yang sudah dilakukan dan dihadapi tahun 2021 yang disebut sebagai *perfect storms* yang sangat menantang; kedua, terkait dengan berbagai agenda yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 yaitu berupa lima lingkup prioritas politik luar negeri.

Disampaikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri RI bahwa Prioritas Diplomasi Indonesia tahun 2022 meliputi : (1) pembangunan ketahanan kesehatan dalam skala nasional, kawasan, dan dunia, (2) penguatan diplomasi ekonomi, (3) penguatan diplomasi perlindungan, (4) penguatan peran kepemimpinan Indonesia di kawasan dan global, dan (5) penguatan infrastruktur diplomasi. Terkait dengan hal tersebut, BKSAP mengapresiasi dan mendukung penuh, serta siap bersinergi guna mewujudkan semua prioritas tersebut.

Secara lebih ringkas, setidaknya ada dua dampak *perfect storm* yaitu; 1) sistem kesehatan dan lambatnya proses pemulihan; serta 2) sistem logistik dan rantai pasok. Akibatnya, melambatnya rantai pasok logistik menyebabkan terganggunya aktivitas ekonomi yang memaksa perusahaan untuk mengurangi jumlah tenaga kerja sehingga pengangguran meningkat. Dari konteks politik di level ASEAN, *perfect storms* ini semakin parah karena ASEAN merupakan suatu titik yang menjadi pusat "perebutan" pengaruh dan rivalitas antara dua kekuatan besar yaitu China dan Amerika Serikat. Ini juga tentu menjadi tantangan ASEAN dalam menjaga netralitasnya. Pada saat yang sama, ASEAN

sendiri dihadapkan pada krisis legitimasi dalam menyelesaikan kondisi krisis politik dan kemanusiaan di Myanmar.

Dalam hal ini, krisis Myanmar telah menggerus kredibilitas ASEAN. Dan pada saat yang sama, Indonesia sebagai *de facto leader* ASEAN harus terus menjaga netralitas dan *unity* ASEAN.



Selama tahun 2021 diplomasi Indonesia bekerja terutama dalam hal diplomasi kesehatan dan berupaya untuk mencapai new normal setelah dihantam Covid-19. Pada tahun 2021, Kementerian Luar Negeri RI fokus pada lima area diplomasi yaitu:

1. Diplomasi kesehatan. Tujuannya adalah untuk membangun kemandirian dan ketahanan nasional di bidang kesehatan. Ini dilakukan di berbagai tingkatan baik regional maupun internasional. Dalam hal ini, Indonesia telah berhasil mengamankan atau menerima 494 juta vaksin dimana 114 jutanya diperoleh secara gratis dari jalur COVAX dan *dose sharing* dari negara-negara sahabat sehingga Indonesia dapat mencapai target WHO yaitu melakukan vaksin terhadap 40% warganya;
2. Diplomasi ekonomi. Fokus dari diplomasi ekonomi terletak pada pembangunan berkelanjutan dan pembangunan hijau. Beberapa langkah yang dilakukan antara lain travel corridor arrangement, saling pengakuan sertifikat vaksin, peningkatan akses pasar, dan investasi. Tahun lalu Indonesia juga melanjutkan program yang dikenal sebagai *Pacific Elevation* yaitu suatu Indonesia *business expose* di Selandia Baru yang mempunyai potensi perdagangan hingga 104 juta dollar;



3. Diplomasi perlindungan. Diplomasi ini fokus pada upaya perlindungan WNI di luar negeri terutama para pekerja migran. Pemerintah RI berhasil melakukan vaksinasi bagi lebih dari 90% Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan menyelesaikan lebih dari 60% kasus yang dialami oleh PMI.
4. Diplomasi perdamaian dan kemanusiaan. Ini dilakukan dengan berbagai cara. Yang terbaru adalah pemberian bantuan kemanusiaan dan juga penguatan kapasitas terutama bagi perempuan Afghanistan. Indonesia menginisiasi *Trust Fund* dan *Roadmap* pemenuhan janji dan komitmen pembangunan Afghanistan.
5. Diplomasi Kedaulatan. Diplomasi ini fokus pada beberapa isu terkait kedaulatan seperti masalah perbatasan negara.

Terkait isu kawasan, ASEAN masih akan menjadi pusat gravitasi kekuatan dunia, baik untuk berebut pengaruh secara politik, juga sebagai lokomotif ekonomi. Tantangan 2022 akan mencakup: (1) Tingkat vaksinasi dan pemerataan vaksin, (2) Pertumbuhan ekonomi positif dan laju pemulihan ekonomi, (3) Pemulihan mobilitas dan varian baru pandemi, (4) Kesadaran dampak iklim DNA aksi iklim, (5) Intensivitas Komunikasi dan *trust deficit*. Presidensi G20 di Indonesia akan menginisiasi terbentuknya *Parliament20* dan *Supreme Audit Institution20* bulan Oktober 2022 akan diselenggarakan 8<sup>th</sup> G20 Parliamentary Speaker's Summit (P20) sedangkan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 akan terselenggara pada bulan November 2022.

Pada tahun 2022, diplomasi RI tentu tetap akan mengedepankan prinsip bebas aktif dengan fokus pada diplomasi di 5 area tadi. Pada level regional, Indonesia akan terus memperkuat centralitas ASEAN dan mempersiapkan Keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023. Pada kepemimpinan tersebut, tentu saja kita akan banyak membicarakan *ASEAN Community* terutama setelah 2025. Sedangkan terkait Myanmar, Pemerintah RI konsisten terhadap sikap bahwa jika tidak ada perbaikan di Myanmar, pertemuan-pertemuan ASEAN pada saat Indonesia memimpin hanya akan dihadiri oleh perwakilan *non-political representatives*.

Wakil Menteri Luar Negeri RI juga menyampaikan bahwa dalam beberapa bulan kedepan, Pemerintah RI akan menjadi host bagi pertemuan G20. Pemerintah sudah pulish tema yaitu "*Recover Stronger, Recover Together*" yang artinya Pulih Bersama, Bangkit Perkasa. Misi G20 adalah mengurangi gap dengan tiga fokus yaitu: memperkuat arsitektur kesehatan global, transisi energi, dan transformasi digital. Dalam rangkaian pertemuan nanti, Presiden Jokowi berharap agar menghasilkan suatu *concrete deliverables* yang langsung bisa dilaksanakan dan dirasakan manfaatnya.

### 3. Diskusi dan Tanya Jawab

Setelah pemaparan oleh Wakil Menteri Luar Negeri RI, selanjutnya Ketua BKSAP membuka waktu diskusi terbuka. Peserta yang memberikan komentar dan tanggapan terhadap substansi diskusi ini.

#### a. Dr. H. Mardani Ali Sera, M.Eng. (A-422/F-PKS- Wakil Ketua BKSAP)

Mengapresiasi kerjasama DPR RI-Duta Besar RI di negara-negara sahabat dalam memfasilitasi berbagai kunjungan yang dilakukan Anggota DPR RI. Selain itu, Kemlu RI juga perlu mendorong adanya *digital Treatment* seperti Peduli Lindungi, bagi WNI yang ada di luar negeri. Disampaikan pula bahwa DPR RI telah membentuk 102 Grup Kerjasama Bilateral dengan berbagai parlemen negara sahabat dan juga pelaksanaan Diplomasi Perorangan oleh setiap Anggota DPR RI yang menghadapi tantangan dengan adanya pandemi Covid ini sehingga beberapa program kunjungan Luar Negeri yang telah direncanakan belum dapat terlaksana, sehingga kemungkinan akan ada banyak pengiriman delegasi apabila situasi Covid sudah mereda. Untuk itu diharapkan Kementerian Luar Negeri RI terus mendukung berbagai kegiatan diplomasi parlemen tersebut.



Terkait penyelenggaraan BKSAP SDG's Day, disampaikan bahwa terdapat potensi kerja sama kampus dalam negeri dengan kampus yang ada di luar negeri yang bisa difasilitasi oleh pihak Kemlu RI., kemudian banyak data di kedutaan tapi ketika ditindaklanjuti ke kementerian ini tidak bisa berkembang, pertanyaannya adalah adakah terobosan yang bisa diambil?

**b. Dr. Syahrul Aidi Ma'azat, L.C., M.A (A-418/F-PKS-Komisi V)**

Menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi terutama terkait vaksinasi di luar negeri yang sudah mencapai titik maksimal. Sebagai Anggota DPR dari Dapil Sulawesi Selatan. Pertanyaannya adalah bagaimana terkait konflik China Selatan kemudian bagaimana dengan persoalan ruang kendali udara dengan Singapura yang baru-baru ini dibahas. Kemudian terkait dengan pariwisata, apakah ada afirmasi untuk pemulihan pariwisata di Bali bagaimana? Dalam pembukaan akses internasional ke negara sangat penting dan peran Kemenlu sangat tinggi sehingga perlu inisiatif-inisiatif yang lebih aktif.



Kementerian Luar Negeri RI diapresiasi karena telah berhasil menuntaskan perjanjian kerjasama untuk mendapatkan *Flight Information Region* (FIR) dari Singapura, walaupun masih ada beberapa pro kontra atas manfaat perjanjian tersebut. Selain itu juga mempertanyakan hubungan koordinasi antara Kemlu dengan Kepala – Kepala Daerah di Indonesia.

**c. Drs. H. Andi Muawiyah Ramly, M.Si (A-57/F-PKB-Komisi X)**

Mengapresiasi capaian diplomasi vaksin yang telah dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri. Terkait isu LCS dan pemulihan pariwisata Bali, peran Kementerian Luar Negeri dinilai penting untuk terus mengadvokasi kedua isu tersebut.



**d. Hj.Himmatul Aliyah, S.Sos., M.Si. (A-78/F-PGERINDRA- Komisi X)**

Menyampaikan perlunya ada pendampingan dan advokasi terhadap tenaga kerja Indonesia di luar negeri sehingga mereka mendapatkan informasi yang cukup apabila terjadi permasalahan ketika bekerja.

Disampaikan bahwa dibutuhkan pemakaman untuk warga negara Indonesia di Mesir. Kemudian bahwa banyak anak-anak yang tidak memiliki status hukum jelas dan merupakan hasil perkawinan campur antara warga negara Mesir dengan orang Indonesia yang tinggal di Mesir tetapi tanpa status yang jelas atau tanpa ijin. Kemudian menanyakan mengenai pelayanan di Kedutaan Besar Indonesia di Malaysia dimana kuat sekali kesan bahwa KBRI disana ada semacam dikuasai oleh Ormas tertentu, serta pelayanan di KJRI Hongkong yang berbelit-belit. Selanjutnya terkait dengan relasi dengan Arab Saudi dimana pemberitaan di media seringkali tidak sesuai terkait dengan kewajiban untuk karantina bagi warga negara Indonesia yang akan kesana.



**e. Gilang Dhielafararez, SH., LLM (A-179/F-PDIP)**

Menyampaikan mengenai rencana penyelenggaraan IPU yang tentu akan terkendala dengan adanya sebaran varian baru omicron, terlebih saat ini BOR Covid sudah mencapai 45%, dan Meminta penjelasan lebih lengkap mengenai perjanjian ekstradisi dengan Singapura serta mengenai peran Kemenlu yang terbaru terkait dengan Indonesian *Free Trade Agreement*.



**f. Hj. Adde Rosi Khoerunnisa, S.Sos., M.Si (A-292/F-PG)**

Menyarankan agar terkait dengan acara-acara besar seperti G20, IPU, dan P20, agar memperhatikan potensi ancaman terorisme semoga bisa betul2 diawasi karena ini merupakan ancaman serius meskipun tidak kelihatan.



**g. Hasbi Anshory, S.E., M.M. (A-78/F-P.NASDEM)**

mendorong untuk terus adanya dukungan terkait diplomasi sawit. Terkait kesepakatan *Five Point Consensus*, dinilai belum adanya perkembangan dan kemajuan yang signifikan. Terkait Presidensi G20, masyarakat banyak yang belum memahami terkait apa urgensi diselenggarakannya acara tersebut. Terkait, *climate change* secara garis besar akan menjadi pembicaraan, namun pemerintah perlu menaruh perhatian lebih pada pengembangan energi terbarukan (EBT).

Menyampaikan kepada Wamenlu terkait kebutuhan diplomasi sawit dan berharap KBRI di seluruh dunia menjadi etalase penjualan bagi UMKM dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi. Disampaikan contoh yang cukup menarik bahwa diluar negeri, rata-rata restaurant di-backup oleh pemerintah dari negaranya masing-masing sehingga perlu dicontoh oleh Pemerintah.



**h. Ir. H. Achmad Hafisz Thohir (A.487/F.PAN-Wakil Ketua BKSAP)**

Menyampaikan bahwa berkaitan dengan Presidensi G20, aspirasi dan harapan rakyat agar berbagai pertemuan tersebut memberikan dampak bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, kita perlu stressing di bagian apa. Selanjutnya, Hafisz Thohir juga menyampaikan terkait isu *climate change* sebagai tema di IPU. Perubahan iklim akan menjadi topik debat yang hangat tentunya. Berdasarkan data yang ada, hanya 5% energi terbarukan yang baru diaplikasikan. Kalau dari sisi pembiayaan, kita butuh 1800 triliun per tahun.



**i. Putu Supadma Rudana, MBA (A-563/F-PD)**

menekankan perlu adanya upaya untuk memfasilitasi daerah dan provinsi untuk bekerja sama dengan berbagai wilayah di negara lain sehingga bisa tercipta berbagai *sister city*, *sister province*, atau *sister regency*. Terkait isu pekerja migran Indonesia, pemerintah perlu memfasilitasi dan mendukung warga negara Indonesia yang akan membuka peluang usaha di negara lain. Pemerintah didorong untuk memberikan bantuan ekonomi kepada pekerja migran untuk membuka lapangan pekerjaan di luar negeri. Isu lainnya, Kemlu RI juga bisa memfasilitasi dan melakukan diplomasi lebih lanjut terkait rencana Kemenko Kemaritiman dan Investasi RI untuk membuka penerbangan internasional ke Bali.



**j. Dr. Sihar P.H. Sitorus, BSBA., MBA (A-139/F-PDIP)**

Secara virtual menyampaikan bahwa Sidang IPU yang akan disenggarakan nanti, akan menjadi ajang sidang internasional besar yang pertama di 2022. Diharapkan hal tersebut dapat menjadi pembukan jalan sebelum menuju G20. Perlu peran serta Kemlu RI untuk meningkatkan *awareness* IPU dan P20 karena tentu berbeda dengan G20. Terkait bantuan dana asing untuk *climate change*, Kemlu RI harus berperan lebih untuk bisa melakukan sosialisasi dan menjembatani isu iklim dengan pemenuhan SDG's.



**k. Drs. H. Dedie A. Rachim Wakil Walikota Bogor,**

Menyampaikan terkait *sister city*. Kota Bogor sendiri sudah menjalin kerja sama dengan 3 (tiga) *Sister City*, yakni Kota Thies di Senegal, Kota Kisarazu di Jepang, dan Kota Lankaran di Azerbaijan. Meski demikian tentu diperlukan peran Kementerian Luar Negeri RI untuk lebih meningkatkan kerja sama dan menjembatani Pemerintah Daerah dengan negara-negara lain.





## I. Tanggapan Wakil Menteri Luar Negeri RI :

Mengingat waktu yang singkat, Wamenlu menyampaikan akan ada jawaban tertulis yang akan disampaikan kepada BKSAP mencakup respons terhadap pertanyaan-pertanyaan para anggota. Namun, sejumlah hal yang menjadi *concern* utama, diantaranya:

- a) P20 menjadi pertemuan yang besar dan menjadi patokan, terkait kesuksesan dan substansinya Kementerian Luar Negeri akan mendukung substansi dari segi materi persiapan, protokol, dan tata cara persidangan mengingat sudah ada standar baku terkait G20 yang harus dipatuhi.
- b) Mengenai beberapa hal yang terkait UMKM dan akan dikoordinasikan dan dilakukan tindak lanjut dengan kementerian negara lain.
- c) Terkait substansi P20, dalam merumuskan dan membahas perubahan iklim perlu mampu mengakomodir kepentingan negara berkembang. Elemen deforestasi juga seringkali menjadi isu yang diperdebatkan terkait deforestasi legal dengan deforestasi secara umum. Peran parlemen dalam pembahasan isu perubahan iklim menjadi penting mengingat sebagai peran parlemen sebagai *policy maker*, berbeda dengan pemerintah yang sifatnya hanya pelaksana kebijakan.
- d) Untuk kasus-kasus perlindungan WNI atau kasus khusus, Kementerian Luar Negeri RI terbuka untuk undangan berdiskusi langsung membahas berbagai persoalan tersebut.
- e) Terkait dengan kerjasama antar universitas, dapat langsung disampaikan informasi detail kampus mana yang berminat kerjasama dengan kampus luar negeri dan Kemlu akan mendampingi.
- f) Terkait dengan pembentukan *sister city*, Kementerian Luar Negeri RI menekankan perlunya *follow up* atau tindak lanjut setelah pembentukan *sister city* tersebut, daripada memperbanyak perjanjian namun terkendala dalam implementasinya. Untuk itu agar dikedepankan kualitas daripada kuantitas saja.

## III. KESIMPULAN dan SARAN

### A. Kesimpulan :

1. Kegiatan pertemuan antara BKSAP dengan Kemenlu yang dalam hal ini diwakili oleh Wamenlu beserta jajaran, berjalan dengan lancar. Diskusi yang terjadi antara Pimpinan BKSAP serta Anggota BKSAP dengan Wamenlu berlangsung cukup komprehensif mencakup semua poin bahasan yang perlu diperhatikan terkait dengan pelaksanaan diplomasi Indonesia. Walaupun tidak semua pertanyaan bisa dijawab oleh

Wamenlu karena adanya keterbatasan waktu, tetapi secara garis besar baik Pimpinan maupun anggota BKSAP cukup puas dengan sesi tanya jawab.

2. Refleksi politik luar negeri Indonesia pada Tahun 2021 masih dihadapkan dengan pandemi covid-19 dan rivalitas yang meluas akibat dari konflik AS-Tiongkok. Tahun lalu masih menjadi tahun yang tidak bisa diperkirakan sebelumnya bagi politik luar negeri Indonesia. Selain itu, multilateralisme juga masih belum berjalan efektif. Secara umum Tahun 2021 dinilai menjadi *perfect storm* yang sangat berakibat pada sistem kesehatan dan lambatnya proses pemulihan, serta berdampak pula pada sistem logistik dan rantai pasok perekonomian dunia.
3. Paparan Wamenlu mengenai proyeksi politik luar negeri Indonesia pada tahun 2022 memberikan wawasan yang cukup bagi Pimpinan dan anggota BKSAP, sebagai gambaran mengenai substansi apa saja yang kiranya dapat dibawa oleh BKSAP dalam melaksanakan diplomasi parlemen untuk tahun 2022.
4. BKSAP dan Kemenlu sepakat untuk bekerja sama dan saling membantu dalam pelaksanaan diplomasi untuk kepentingan nasional Indonesia, khususnya terkait penguatan substansi yang dibutuhkan BKSAP dalam rangka menghadapi beberapa *event* internasional kedepan, dimana BKSAP akan menjadi tuan rumah penyelenggaraannya.
5. Peran penting DPR RI di dalam *Parliament20* (P20) yang merupakan *Engagement Group* yang memfasilitasi pertukaran informasi terbaik diantara Parlemen negara anggota G20. P20 sendiri merupakan inisiatif dibawah Presidensi G20 Indonesia.

## B. Saran

- Forum pertemuan dengan Kemenlu RI dapat terus dilaksanakan secara berkesinambungan untuk meningkatkan profil BKSAP DPR RI sebagai Alat Kelengkapan Dewan di DPR RI yang juga mempunyai mandat untuk membantu memperkuat diplomasi pemerintah melalui *multi-track diplomacy* mempunyai peran vital dalam mensukseskan berbagai kebijakan luar negeri RI.
- Berharap sinergitas antara BKSAP DPR RI dan Kementerian Luar Negeri RI dapat terus terjalin dengan baik, dengan menyamakan frekuensi di awal tahun.
- Melihat antusiasme dan sambutan pemerintah daerah dalam pelaksanaan acara ini, BKSAP diharapkan terus melakukan sinergi antara diplomasi parlemen dan diplomasi yang dilakukan *stakeholders* lainnya.

- Diharapkan agar laporan ini dapat diteruskan kepada Komisi terkait di DPR RI yang memiliki keterkaitan isu yang dibahas selama kegiatan Pertemuan dengan Kemenlu RI. Dalam kesempatan ini, laporan dapat diteruskan kepada misalnya Komisi I, Komisi III, Komisi IV, Komisi IX, dan Komisi XI.

## IV. PENUTUP

### A. ANGGARAN

Biaya yang digunakan untuk melakukan perjalanan 13 (tiga belas) Anggota DPR RI dan 32 (tiga puluh dua) orang Sekretariat (Pejabat, Tenaga Ahli, Pemberitaan dan TV Parlemen) adalah sebesar Rp. 258.186.000,- (*Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah*)

### B. DOKUMENTASI

#### 1. Foto

#### 2. Tautan

- Post Instagram BKSAP :  
[https://www.instagram.com/p/CXavzPcPtIN/?utm\\_medium=copy\\_link](https://www.instagram.com/p/CXavzPcPtIN/?utm_medium=copy_link)
- <https://ksap.dpr.go.id/berita/detail/id/37295>
- <https://ksap.dpr.go.id/berita/detail/id/37304>

### C. KATA PENUTUP

Demikianlah pokok-pokok Laporan pelaksanaan pertemuan dengan jajaran Kementerian luar Negeri pada tanggal 27 Januari 2022 di Bogor Selatan. Dokumen terkait akan dijadikan lampiran. Kami mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya acara ini.

Semoga bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, Januari 2022

Ketua BKSAP

**DR. H. Fadli Zon, S.S., M.Sc**

**A-86**

## LAMPIRAN

- Dokumentasi Foto













▪ Lampiran Bahan Pertemuan Kementerian Luar Negeri RI



# 01 DIPLOMASI KESEHATAN



### DIPLOMASI KESEHATAN

- 494 JUTA** DOSIS VAKSIN TELAH DITERIMA
- 114 JUTA** DOSIS (23%) DIPEROLEH SECARA GRATIS MELALUI COVAX DAN DOSE-SHARING
- 40%** POPULASI TELAH DI VAKSINASI PENUH, SESUAI TARGET WHO, SAMPAI AKHIR 2021
- PERINGKAT 5** NEGARA DENGAN VAKSINASI TERTINGGI, SEJUMLAH 310 JUTA DOSIS VAKSIN

COVAX

AS OF 26 JANUARI 2022



### DIPLOMASI KESEHATAN

- 494 JUTA** DOSIS VAKSIN TELAH DITERIMA
- 114 JUTA** DOSIS (23%) DIPEROLEH SECARA GRATIS MELALUI COVAX DAN DOSE-SHARING
- 40%** POPULASI TELAH DI VAKSINASI PENUH, SESUAI TARGET WHO, SAMPAI AKHIR 2021
- PERINGKAT 5** NEGARA DENGAN VAKSINASI TERTINGGI, SEJUMLAH 310 JUTA DOSIS VAKSIN

COVAX

AS OF 26 JANUARI 2022



- INDONESIA SECARA KONSISTEN MEMPERJUANGKAN KESETARAAN AKSES VAKSIN

PER MID-JAN 2022, COVAX TELAH KIRIMKAN

# 1 MILIAR

DOSIS VAKSIN KE 144 NEGARA

COVAX

- MENDORONG KERJA SAMA BUMI FARMASI INDONESIA DALAM PENINGKATAN KAPASITAS MENJADI PRODUCTION HUB DI KAWASAN
- MENDORONG PEMULIHAN KESEHATAN DI KAWASAN DAN KETAHANAN KESEHATAN KAWASAN

# 02 DIPLOMASI EKONOMI



# 03 DIPLOMASI PELINDUNGAN



# 03 DIPLOMASI PELINDUNGAN

SEPANJANG 2021...

**90%**  
DARI TOTAL 29.233 KASUS TELAH DIBELESAIKAN

**240.000 4 WNI**  
SEMBAKO TELAH DISALURKAN DIBEBASKAN DARI PENYANDERAAN DI FILIPINA

**>73.000 7 WNI**  
ORANG TELAH FASILITASI REPATRIASI, TERMASUK 1.300 ABG

**RP. 179,3 M**  
DIBEBASKAN DARI HUKUMAN MATI HAK FINANSIAL DISELAMATKAN

SEPANJANG 2021...

**88.637 26 WNI**  
ORANG WNI DI FASILITASI PEMBERIAN VAKSIN DAN 7 WNA DIEVAKUASI DARI AFGHANISTAN

KERJA SAMA BILATERAL DAN  
NORM SETTING DI LEVEL  
MULTILATERAL

- 1 PENYELESAIAN MOU PENEMPATAN DAN KETENAGAKERJAAN  
ABK DENGAN KOREA SELATAN
- 2 MENJADI INISIATOR RESOLUSI SMU PBB VIOLENCE AGAINST WOMEN  
MIGRANT WORKERS BERSAMA DENGAN FILIPINA

04 DIPLOMASI  
PERDAMAIAN  
DAN  
KEMANUSIAAN



“ PEMERINTAH AFGHANISTAN YANG  
INKLUSIF, MENGHORMATI HAM DAN  
HAK PEREMPUAN

“ KESELAMATAN DAN  
KESEJAHTERAAN RAKYAT  
AFGHANISTAN ADALAH PRIORITAS  
UTAMA



TRUST FUND  
Kemanusiaan Afghanistan

ROADMAP  
Pemenuhan janji dan komitmen




PEACE & STABILITY



FIVE-POINT  
CONSENSUS





# 2022

i  
Diplomasi Kesehatan

ii  
Diplomasi Ekonomi

iii  
Diplomasi Pelindungan


iv  
Diplomasi Kedaulatan

v  
Kontribusi RI di Kawasan dan Dunia


## Pemulihan Kesehatan Nasional


Juli 2022


# Target Vaksinasi 70%




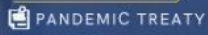
### Penguatan infrastruktur dan industri kesehatan nasional



  
 World Health Organization

  
 MEKANISME PENDANAAN



  
 PANDEMIC TREATY

### Penguatan Arsitektur Kesehatan Global



## Upaya Pemulihan Ekonomi Nasional

- Skema perjalanan lintas batas
- Penguatan industri strategis nasional
- Pacific Forum for Development
- Investor Engagement
- Kemitraan transisi energi, ekonomi hijau
- Penyelesaian perundingan CEPA/FTA/PTA
- Sistem perdagangan internasional

## Diplomasi Pelindungan

Transformasi Digital



Infrastruktur dan SDM



Kerangka Hukum dan Kerja Sama







# UNCLOS







## Perundingan Batas Darat




# Dasar Diplomasi Kedaulatan

- > Piagam PBB
- > Hukum Internasional

## Kontribusi Indonesia di Kawasan dan Dunia

- Afghanistan
- Palestina
- Peacekeeping mission
- HAM & Demokrasi



**FIVE-POINT CONSENSUS ON THE SITUATION IN MYANMAR.**  
THE LEADERS REACHED CONSENSUS ON THE FOLLOWING:

1. First, there shall be immediate cessation of violence in Myanmar and all parties shall exercise utmost restraint.
2. Second, constructive dialogue among all parties concerned shall commence to seek a peaceful solution in the interests of the people.
3. Third, a special envoy of the ASEAN Chair shall facilitate mediation of the dialogue process, with the assistance of the Secretary General of ASEAN.
4. Fourth, ASEAN shall provide humanitarian assistance through the AHA Centre.
5. Fifth, the special envoy and delegation shall visit Myanmar to meet with all parties concerned.



**G20 INDONESIA 2022**  
RECOVER TOGETHER  
RECOVER STRONGER



- Arsitektur kesehatan global
- Transisi energi
- Transformasi digital

**Presidensi G20**

- > **Parliament-20**
- > **Supreme Audit Institution-20**

**2022**

September 2022      November 2022

8th G20 Parliamentary Speaker's Summit (P20)      KTT G20

**FIRST G20 SHERPA MEETING**



**Terima Kasih**

© (MIRIAM) 2022



▪ **Jawaban Tertulis Kemenlu RI atas Pertanyaan Anggota BKSAP DPR RI**



WAKIL MENTERI LUAR NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 4 Februari 2022

Nomor : 00001/LM/02/2022/02/R  
Sifat : Segera/Rahasia  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Perihal : Penyampaian Jawaban atas  
Pertanyaan dalam Rapat BKSAP  
DPR RI, Kamis, 27 Januari 2022

Yang Terhormat  
**Ketua BKSAP DPR RI**  
di  
Jakarta

Merujuk perihal pada pokok surat, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kesempatan untuk berdialog mengenai perkembangan politik luar negeri RI dengan Ibu/Bapak Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (BKSAP DPR RI) yang terhormat pada Rapat BKSAP DPR RI, Kamis, 27 Januari 2022.
2. Berkenaan dengan sejumlah pertanyaan Ibu/Bapak Anggota BKSAP DPR RI yang belum terjawab secara rinci dalam forum Rapat BKSAP DPR RI, terlampir kami sampaikan jawaban terkait. Kami lengkapi, untuk setiap jawaban itu, unit yang menangani (PIC) di Kemenlu yang siap memberikan pendalaman atau tindaklanjut bagi Bapak dan Ibu Pimpinan dan Anggota BKSAP yang memerlukannya. Kami berharap jawaban dimaksud dapat memberikan penjelasan yang diperlukan.

Demikian, atas perhatian Bapak Ketua BKSAP DPR RI, diucapkan terima kasih.

  
Mahendra Siregar

**Tembusan:**

Yth. Menteri Luar Negeri (sebagai laporan)

**JAWABAN TERHADAP PERTANYAAN ANGGOTA BKSAP DPR RI  
DALAM DISKUSI WAMENLU BERSAMA BKSAP DPR RI  
27 JANUARI 2022  
=====**

**I. Bapak Hafisz Tohir-Fraksi PAN**

**1. Apakah peran Parlemen RI dalam Presidensi G20 Indonesia?**

*(Unit penjurur: Staf Khusus untuk Penguatan Program-Program Prioritas dan Satgas G20, dan Staf Ahli Bidang Hubungan Antarlembaga)*

**Jawaban**

- Pemerintah berkomitmen agar Presidensi G20 Indonesia memberikan dampak konkret bagi pemulihan dan pertumbuhan ekonomi, khususnya nasional. Tema "*Recover Together Recover Stronger*" atau "Pulih Bersama Bangkit Perkasa" menekankan pentingnya semangat inklusivitas, termasuk pelibatan Parlemen.
- Melalui jalur P20 RI dengan tema "*The Role of Parliament in Promoting Higher Growth and Healthy Society*", DPR RI memiliki peran penting untuk menggalang solidaritas global dalam mewujudkan pemulihan inklusif dan berkelanjutan.
- Untuk itu, Kemlu siap berkoordinasi dengan Parlemen RI guna menyinergikan upaya yang dibahas pada berbagai *track*, khususnya dalam mencapai 3 Prioritas Presidensi G20 Indonesia di sektor kesehatan, ekonomi digital, dan transisi energi secara konkret.

**II. Bapak Gilang Dhiela Fararez-Fraksi PDIP (Pertanyaan ke-1)**

**2. Apakah peran Kemlu pada *Indonesia-EU Agreement (I-EU Comprehensive Economic Partnership Agreement/I-EU CEPA)*? Apakah Indonesia akan mendapatkan untung atau hanya akan menjadi pasar bagi UE?**

*(Unit Penjurur: Dit KSIA Amerop, Ditjen Amerop)*

**Jawaban:**

- Proses perundingan *Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA)* dimulai tanggal 18 Juli 2016. Proses perundingan I-EU CEPA masih berlangsung.
- Peran Kemlu adalah mendukung proses perundingan yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan dan membantu sebagai juru runding untuk isu *trade and sustainable development*.
- Perjanjian berpotensi meningkatkan nilai perdagangan hingga 5 miliar Euro per tahun pada 2030, termasuk meningkatkan investasi dari negara UE.

- Bagi Indonesia, UE merupakan mitra komprehensif dan pasar potensial serta sumber investasi dan teknologi yang strategis. Nilai perdagangan Indonesia–UE mengalami peningkatan, meskipun di tengah situasi pandemi.

Catatan: UE adalah mitra dagang terbesar ke-3 Indonesia setelah RRT dan AS, dan secara konsisten Indonesia mengalami surplus perdagangan dalam 5 tahun terakhir (2017—2021). Di 2021 (per November), nilai perdagangan USD16,1 miliar dengan surplus bagi Indonesia sebesar USD6,5 miliar.

### III. Bapak Hasbi Anshory-Fraksi Partai NasDem

#### 3. Bagaimana *update* dari diplomasi sawit?

(Unit Penjuru: Dit. Perdagangan, Perindustrian, Komoditas dan Kekayaan Intelektual, Ditjen KS Multilateral, dan Dit. KSIA Amerop, Ditjen Amerop)

##### Jawaban:

- Ekspor produk sawit dan turunannya cenderung meningkat cukup signifikan meski masih terdapat diskriminasi dan kampanye negatif terhadap minyak sawit Indonesia, khususnya LSM di beberapa negara Uni Eropa.
- Tujuan diplomasi minyak nabati Indonesia adalah agar setiap jenis minyak nabati mendapatkan perlakuan yang sama dan tidak ada kebijakan yang diskriminatif. Kelapa Sawit merupakan bagian dari diplomasi ekonomi Indonesia.
- Upaya yang dilakukan terkait diplomasi sawit:
- Melakukan *counter narrative*, promosi positif, dan pendekatan kepada negara-negara yang mendukung *sustainable palm oil* melalui berbagai inisiatif, baik secara bilateral (RI-UE), regional (ASEAN-UE); maupun dalam konteks global (antara lain melalui FAO).
  - Mendorong standardisasi seluruh minyak nabati termasuk sawit, dan kontribusinya dalam pencapaian Pembangunan Berkelanjutan/SDGs.
  - Terus melakukan *comparative study* mengenai keberlanjutan semua jenis minyak nabati yang telah dimulai dengan Belanda dan Ceko.

### IV. Bapak Gilang Dhiela Fararez-Fraksi PDIP (Pertanyaan ke-2)

#### 4. Bagaimanakah posisi Indonesia terhadap konflik Ukraina-Rusia?

(Unit penjuru: Dit. Eropa II, Ditjen Amerop)

**Jawaban:**

- Indonesia memiliki hubungan bilateral yang baik dengan Rusia dan Ukraina.
- Indonesia di berbagai peluang interaksi bilateral dengan kedua negara, tekankan pentingnya pihak terkait untuk meredakan ketegangan, mencegah eskalasi konflik serta mencari penyelesaian damai melalui diplomasi.
- Hingga saat ini, situasi masih terpantau aman dan kondusif sehingga penarikan staf KBRI Kyiv ataupun repatriasi WNI di Ukraina belum diperlukan. KBRI catat 131 WNI di Ukraina.
- Namun demikian, perlindungan WNI adalah prioritas dan oleh karenanya KBRI Kyiv terus lakukan koordinasi intensif dengan Pemerintah setempat serta memantau situasi keamanan di lapangan.

**V. Bapak Putu Supadma-Fraksi Partai Demokrat**

**5. Apa yang Kemlu dapat lakukan dalam memfasilitasi kebutuhan tenaga kerja dan bahan baku dari Indonesia di Rumania?**

(Unit penjur: Dit. Eropa II, Ditjen Amerop)

**Jawaban:**

Ketenagakerjaan

- Memfasilitasi pembahasan MoU Kerja Sama bidang Ketenagakerjaan antara Kemnaker RI dengan Kementerian *Social Justice* Rumania, sebagai payung kerja sama yang terarah pada sektor penempatan PMI ke Rumania.

Pengadaan Bahan Baku

- Menyelenggarakan *Business Forum* yang pertama untuk kawasan Eropa Tengah dan Timur "INACEE" (7 Oktober 2021) dengan kesepakatan bisnis senilai US\$3,1 juta atau sekitar Rp.44 miliar.
- Mengembangkan *platform* INA-ACCESS untuk menjembatani interaksi pebisnis Indonesia dengan mancanegara termasuk Rumania melalui *platform* digital.
- Memfasilitasi interaksi para pelaku usaha kedua negara, seperti melalui:
  - Promosi terpadu dengan Kementerian Pertanian: *One Day with Indonesian Coffee, Fruit, Floriculture and Food Crops/ODICOFF* (29 November 2021).
  - Promosi produk-produk Indonesia melalui partisipasi pada pameran tahunan di Rumania.

- Memfasilitasi pengembangan kerja sama pengembangan pelabuhan antara *port authority* Constanta, Rumania dengan Pelindo II (Maret 2020).

**VI. Ibu Himmatul Aliyah-Fraksi Partai Gerindra**

**6. Terdapat kesulitan pemakaman WNI di Mesir sehingga harus menumpang kepada yayasan lain. Negara-negara lain telah memiliki pemakaman sendiri dan mengapa Indonesia belum memilikinya?**

(Unit penjurur: Dit. Pelindungan WNI, Ditjen Protkons dan Dit. Timur Tengah, Ditjen Aspasaf)

**Jawaban:**

- Lahan pemakaman khusus Indonesia dapat diijazahi sesuai peraturan yang berlaku di Mesir. Selama ini, sesuai masukan KBRI Cairo, WNI yang meninggal di Mesir dapat dimakamkan di Mesir melalui bantuan kekonsuleran dari KBRI Kairo.

\*\*\*\*\*